

Antitesis Demokrasi yang Amoral

Demokrasi Indonesia hari ini berada pada persimpangan yang genting. Secara prosedural, ia tampak berjalan baik: pemilu berlangsung, partai bekerja, dan mekanisme formal terpenuhi. Namun dari sisi moralitas, demokrasi kita mengalami kemerosotan yang tidak bisa lagi dinafikan. Proses politik yang seharusnya menjadi ruang gagasan justru berubah menjadi arena transaksi, sunyi dari integritas, riuh oleh kepentingan.

Kita sedang hidup dalam sebuah ironi besar, Indonesia mengklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi proses politiknya justru menjadi ruang paling transaksional. Demokrasi kita berjalan, tetapi tanpa ruh moral. Hasilnya? Pemimpin terpilih sering bukan yang paling berintegritas, tetapi yang paling kuat secara finansial.

Dalam sistem yang seperti ini, jangan berharap etikabilitas, intelektualitas, atau moralitas menjadi ukuran utama. Ketiganya justru dianggap "BEBAN", karena tidak dapat dikapitalisasi menjadi suara.

Yang lebih memprihatinkan: praktik amoral ini kadang-kadang ditemukan dalam kontestasi seperti Pemilu atau

Pilakda.. Politik uang seolah tidak lagi sekadar pelanggaran, tetapi menjadi "aturan main" yang dianggap normal. Mahar politik, jual-beli rekomendasi, pembiayaan pencalonan yang selangit, semuanya dibiarkan terjadi seolah-olah kita sedang memaklumi demokrasi diatur oleh pasar gelap.

Jika demikian, untuk apa kita mengklaim sebagai negara demokrasi? Demokrasi yang kehilangan nilai tidak berbeda dengan plutokrasi, kekuasaan oleh segelintir orang kaya.

Pertanyaannya sederhana namun tajam:

Apakah sistem ini akan berubah dengan sendirinya?

Atau kita harus memaksanya berubah?

Jawabannya jelas: perubahan tidak akan datang dari mereka yang menikmati keuntungan sistem. Reformasi harus didorong dari dua sumber: tekanan publik dan perbaikan regulasi secara radikal.



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

Pertama, biaya politik harus diturunkan secara paksa melalui reformasi pendanaan partai. Negara harus mengambil alih pembiayaan partai agar tidak digerogeti oligarki. Kedua, demokratisasi internal partai tidak boleh lagi menjadi jargon. Mekanisme primary election harus diwajibkan agar calon pemimpin tidak ditentukan oleh ruang gelap elit.

Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin baik, yang kurang adalah sistem yang memungkinkan mereka tampil. Karena itu, membenahi demokrasi bukan sekadar wacana, tetapi perjuangan generasi. Jika harga demokrasi hari ini ditentukan oleh uang, maka harga masa depan bangsa sedang ditentukan oleh mereka yang mampu membeli kekuasaan.

Keberanian untuk mengantitesis segelumit persoalan demokrasi kita, khususnya pada perilaku amoral tentu dapat diwujudkan dengan menciptakan sistem yang menafsirkan demokrasi menjadi tanggung bersama sehingga perwujudan demokrasi yang baik juga

menjadi tugas kita bersama, tugas kita bukan meruntuhkan demokrasi, melainkan merebut kembali moralitas yang pernah hilang dari panggung politik Indonesia.

Jika kita berhasil melakukannya, maka demokrasi tidak hanya akan tegak sebagai prosedur, tetapi juga bermartabat sebagai peradaban.

Pemulihan moral demokrasi merupakan prasyarat untuk memastikan keberlanjutan kehidupan politik Indonesia. Reformasi harus dilakukan secara bertahap melalui rekonstruksi regulasi, tata kelola partai, dan transformasi budaya politik. Demokrasi tidak perlu ditinggalkan; ia perlu diperbaiki dari dalam agar kembali menjadi instrumen untuk memilih pemimpin yang berintegritas.

Demokrasi akan kembali menemukan martabatnya ketika ia dijalankan dengan niat untuk mengabdikan, bukan sekadar memenangkan kekuasaan. Dan ketika keberanian moral muncul dari rakyat maupun elite, saat itulah kita dapat menyaksikan demokrasi bukan hanya sebagai prosedur, tetapi sebagai peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.